

ABSTRAK

Potret penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tindak pidana narkoba pada saat ini menunjukkan pelaku hanya dipidana penjara dan denda, pada kasus tertentu uang hasil kejahatan tidak bisa ditemukan atau dikembalikan, dan masih ditemukan berbagai kendala lainnya dalam proses penegakan hukum TPPU. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkoba, menemukan dan menganalisis alasan penegakan hukum TPPU yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana belum berbasis nilai keadilan, dan pada akhirnya menemukan dan merumuskan rekonstruksi penegakan hukum TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Dari aspek normatif, penelitian ini difokuskan pada perumusan ketentuan dalam UU TPPU berkaitan dengan UU Tindak Pidana Narkoba yang perlu diperbaiki perumusannya, dilengkapi atau dirubah guna penyempurnaannya. Sedangkan dari aspek empiris, penelitian ini diarahkan pada pertimbangan dari para praktisi berkaitan dengan penerapan ketentuan tersebut pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan serta ketentuan apa saja yang perlu direkonstruksi dan bagaimana bentuknya. Peneliti ini menggunakan 3 (tiga) teori utama sebagai pisau analisis, dimana peneliti menggunakan *Grand Theory* yang terdiri dari Teori Keadilan, Pancasila, dan Teori Sistem Hukum. *Middle Range Theory* yang terdiri dari Teori Penegakan Hukum dan Tujuan Pemidanaan, dan *Applied Theory*, dimana penulis menggunakan Teori Hukum Progresif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkoba adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Penegakan Hukum TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan karena konsep penegakan hukum belum dilakukan secara menyeluruh baik itu dengan pencegahan dan penindakan. Rekonstruksi penegakan hukum terhadap pelaku TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan melalui merevisi ketentuan hukum materiil dan hukum formiil terkait penegakan hukum TPPU berkaitan dengan tindak pidana narkoba dengan menempatkan keadilan yang hakiki. Keadilan tersebut yaitu keadilan dalam Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkoba, Nilai Keadilan.

ABSTRACT

Portrait of Money Laundering enforcement related to Narcotics Crime currently shows that the perpetrators are only sentenced to prison and fines, in certain cases, the proceeds of crime cannot be found or returned, and there are still many other obstacles in Money Laundering enforcement. Based on this, Money Laundering enforcement related to Narcotics Crime in the criminal justice system is not based on value of justice.

This research aims to examine and analyze the factors that influence the process of law enforcement against Money Laundering actors relating to Narcotic Crime; Review and analyze why Money Laundering enforcement related to Narcotics Crime in the Criminal Justice System is not based on value of justice; and finally formulating the reconstruction of Money Laundering enforcement related to Narcotics Crime in the criminal justice system in Indonesia based on the value of justice.

The research method used is normative-empirical law research (applied law research). From the normative aspect, this research is focused on the formulation of provisions in the Money Laundering enforcement related to Narcotics Crime which needs to be improved, supplemented or amended in order to improve it. While from the empirical aspect, this research is directed at the consideration of practitioners relating to the application of these provisions in the event of "law in concreto" in order to achieve the goals specified in the regulation as well as what provisions need to be reconstructed and how the revision forms. This researcher used 3 (three) main theories for analysis, where the researcher uses the Grand Theory which consists of Justice Theory, Pancasila, and Legal Systems Theory. Middle Range Theory which consists of Law Enforcement Theory and Criminal Purpose, and Applied Theory, where the authors use Progressive Legal Theory.

The results showed that the factors that influenced the law enforcement process against TPPU perpetrators related to narcotics crime were Internal Factors and External Factors. Law Enforcement The TPPU is related to narcotics crime in the criminal justice system which is not yet based on the value of justice because the concept of law enforcement has not been carried out thoroughly either by prevention (preventive) and repression (repressive). Reconstruction of law enforcement against money launderers related to narcotics in the criminal justice system can be done through revising the provisions of material law and formal law related to law enforcement in relation to narcotics crime by placing the essential justice. This justice is justice in Pancasila, the 1945 Constitution and the principles of statutory regulations.

Keywords: Money Laundering Criminal Acts, Law Enforcement, Narcotics Crime Acts, Value of Justice.